

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Metropolitan Bandung, sebagaimana tercantum dalam PP 47 Tahun 1997 tentang RTRWN 2015 dan Perda 2 Tahun 2003 tentang RTRWP Jawa Barat 2010, ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sebagai PKN, Metropolitan Bandung, selain akan berperan sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan Internasional, juga akan berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa propinsi. Pada skala regional, Metropolitan Bandung juga merupakan kawasan andalan, yaitu kawasan yang berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi ke kawasan sekitarnya.

Berbagai fungsi diatas timbul sebagai akibat perkembangan yang pesat dari kegiatan industri, perdagangan, dan jasa yang telah tumbuh sejak beberapa dekade sebelumnya. Semua ini telah menjadikan kota Bandung sedemikian menarik, tidak hanya bagi penduduk yang berasal dari Jawa Barat sendiri tetapi dari provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk ini, sektor ekonomi sebagai sektor yang memiliki responsivitas paling tinggi terhadap kebutuhan penduduk, semakin melaju pertumbuhannya, dan telah menjadikan kota Bandung sebagai kota metropolitan ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Karakter metropolitan, yang diindikasikan secara ekonomi melalui tumbuhnya mega mal, supermarket dan hypermarket, semakin lama semakin kuat melekat pada penduduk kota Bandung dan sekitarnya, bahkan sepertinya telah menjadi suatu kebutuhan mendasar untuk melakukan kegiatan sosial-ekonomi di Kota Bandung, walaupun hal itu dilakukan melalui pengorbanan dalam bentuk kehilangan atas waktu, tenaga dan biaya

Fenomena ekonomi diatas tidak hanya dialami oleh Kota Bandung semata, tetapi juga dihadapi oleh kota-kota lainnya di Indonesia, bahkan di negara lainnya. Hal ini dapat dipahami karena fenomena ini telah menjadi suatu bentuk *tantangan ekonomi global* yang dicirikan oleh hilangnya batas-batas wilayah dari kegiatan ekonomi.

Berkaitan dengan fenomena sosial-ekonomi diatas, 2 konsekuensi langsung yang dihadapi adalah : Pertama, orientasi pergerakan menuju Kota Bandung yang tinggi. Kedua, semakin meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada, terutama sumber daya lahan dan sumber daya air. Kedua konsekuensi ini bekerja secara timbal balik, yang secara kumulatif menghasilkan bentuk *tekanan internal* bagi Metropolitan Bandung, yaitu :

- 1 *Kemacetan lalu lintas*. Kemacetan lalu lintas ini dipicu oleh tidak sebandingnya ketersediaan dengan kebutuhan transportasi. Kemacetan lalu lintas ini direspon oleh mekanisme pasar (ekonomi) lahan dalam bentuk semakin dekat pusat kota semakin mahal harga lahan. Bagi penduduk yang memiliki keterbatasan ekonomi, tentunya tidak ada pilihan, mencari lahan baru diluar kota atau memilih lahan di dalam kota dengan kompensasi tertentu, seperti kualitas lingkungan yang berbeda, atau luasan lahan yang tidak sepadan. Oleh karena itu, kawasan permukiman kumuh semakin bertambah.
- 2 *Perkembangan guna lahan yang acak*. Penyebaran ini berbentuk acak, menyebabkan mahalnya biaya pembangunan infrastruktur. Dengan adanya

keterbatasan fiskal pemerintah daerah mengakibatkan adanya kesenjangan pelayanan infrastruktur sebagai kebutuhan dasar. Selain itu, karakter sosial masyarakat parahyangan yang "ngariung" mendistorsi pasar lahan, sehingga mekanisme pasar lahan tidak bekerja secara penuh. Sebagai akibat tuntutan atas pemenuhan kebutuhan dasar dan tuntutan pola hidup metropolis diatas, perkembangan guna lahan yang menyebar ini cenderung akan membentuk *extended metropolitan region*.

- 3 *Daya dukung lingkungan yang menurun.* Menurunnya daya dukung ini disebabkan pemanfaatan sumber daya yang ekstensif tanpa didukung oleh strategi pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan. Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan polusi udara, serta penurunan muka air tanah dalam, merupakan indikasi kuat atas penurunan daya dukung lingkungan ini.

Dengan adanya dua tantangan yang harus dipertemukan solusinya, yaitu : (a) berfungsinya peran Metropolitan Bandung sebagai PKN maupun sebagai kawasan andalan hingga tahun 2015; dan (b) penanganan atas tantangan global dan tekanan internal diatas, akan menuntut adanya suatu pengaturan yang terencana. Untuk itu, kebijakan penataan ruang wilayah Metropolitan Bandung sangat diperlukan, selain untuk memberikan arah kebijakan pengembangan wilayah Metropolitan Bandung, juga untuk menjembatani kebijakan RTRWP yang bersifat makro dengan kebijakan RTRW Kab/Kota yang bersifat parsial, kedalam suatu rencana wilayah yang mempunyai kedalaman yang lebih rinci daripada RTRWP namun tetap mengatur hal-hal yang bersifat regional. Pengaturan hal-hal yang bersifat regional ini akan diarahkan melalui Kebijakan Struktur Ruang Metropolitan Bandung.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan struktur tata ruang Metropolitan Bandung adalah:

1. Mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya wilayah Metropolitan Bandung secara berkelanjutan.
2. Menyerasikan kebijakan pemanfaatan ruang antarwilayah dan antarsektor
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan
4. Memberikan arahan struktur tata ruang yang berlandaskan pada kebijakan kabupaten/kota di wilayah Metropolitan Bandung, propinsi dan nasional sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Sasaran penyusunan struktur tata ruang Metropolitan Bandung adalah:

1. Terumuskannya strategi pembangunan perkotaan
2. Terumuskannya pembagian wilayah pembangunan wilayah perkotaan
3. Terumuskannya sistem perkotaan
4. Terumuskannya strategi pengembangan sistem infrastruktur wilayah
5. Terumuskannya indikasi program/kegiatan pembangunan wilayah

1.3 Kedudukan dan Fungsi

Kedudukan Rencana Struktur Ruang Metropolitan Bandung adalah sebagai rencana yang menjembatani rencana struktur ruang di RTRW Provinsi (RTRWP) Jawa Barat dengan rencana struktur ruang di RTRW Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Metropolitan Bandung.

Fungsi dari Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Metropolitan Bandung adalah sebagai acuan dalam :

- a. Menyepakati strategi pembangunan wilayah perkotaan
- b. Menetapkan kebijakan dan rencana pengembangan pusat-pusat pelayanan
- c. Menetapkan kebijakan dan rencana pengembangan infrastruktur wilayah
- d. Menyepakati kapasitas daya dukung lingkungan

1.4 Ruang Lingkup

Rencana Struktur Tata Ruang Metropolitan Bandung mencakup wilayah seluas 338.394,38 ha yang meliputi seluruh wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan 3 (tiga) kecamatan Kabupaten Sumedang. Batas-batas wilayah Metropolitan Bandung adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur

Substansi Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Metropolitan Bandung adalah meliputi, strategi pembangunan perkotaan, rencana pengembangan zona wilayah, rencana pengembangan sistem kota-kota dan rencana pengembangan infrastruktur wilayah yang terdiri dari rencana pengembangan prasarana permukiman, rencana pengembangan transportasi, rencana pengembangan sumber daya air, dan rencana penanganan lingkungan.

Rencana Struktur Ruang Metropolitan Bandung yang disusun untuk jangka waktu 20 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2025.

1.5 Sistematika

Sistematika Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Metropolitan Bandung disusun atas beberapa bagian sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | PENDAHULUAN
Berisi penjelasan latar belakang perlunya disusun rencana struktur tata ruang metropolitan Bandung, tujuan dan sasaran, fungsi dan kedudukan serta ruang lingkup dan sistematika penyajian. |
| Bab II | PROFIL WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG
Berisi penjelasan mengenai kondisi eksisting dan permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan, perkembangan penggunaan lahan, infrastruktur wilayah, sosial-ekonomi dan lingkungan. |
| Bab III | ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG
Berisi analisis tentang strategi dan kebijakan penataan ruang, analisis sosial ekonomi, analisis kebutuhan infrastruktur, analisis guna lahan dan analisis daya dukung lingkungan |
| Bab IV | PENGEMBANGAN KONSEP STRUKTUR TATA RUANG
Berisi dasar pertimbangan, strategi pembangunan perkotaan, pembagian zona pembangunan, pengembangan sistem kota-kota, pengembangan infrastruktur wilayah, serta kriteria pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. |
| BAB V | RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG
Berisi tentang rencana tindak yang perlu dilakukan dalam mewujudkan struktur tata ruang yang terdiri dari rencana tindak pengembangan sistem kota-kota dan zona wilayah, pengembangan infrastruktur wilayah dan penanganan lingkungan di Metropolitan Bandung. |